

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA KEDIRI

Nahdya Alfaina Karem

Institute Agama Islam Negeri Kediri

Yuliani

Institute Agama Islam Negeri Kediri

Binti Mutafarrida

Institute Agama Islam Negeri Kediri

Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah, Institute Agama Islam Negeri Kediri

Dosen Prodi Ekonomi Syari'ah, Institute Agama Islam Negeri Kediri

Korespondensi penulis : alfainakarem@gmail.com

Abstract : *This study aimed to describe the strategy DinKop UMKM in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) which focused on the trade sector. In this case, the marketing mechanism which became one of the benchmarks in the development of UMKM. Moreover, empowerment conducted by DinKop UMKM should be maximized to increase the capacity of human resources in order to produce innovative products. In empowering micro, small, and medium-needed three phases which initials, participatory phase, and phase emancipatory. This research method is descriptive qualitative. Data collection instruments are interviews and observations on location and also based on documents/ records/reports and legislation relating to the matter being investigated. The focus of this research is based on the initial phase, the phase of the participatory, emancipatory phase. These results indicate that the empowerment strategy DinKop UMKM in empowering Small, Mikro, and Medium Enterprises is not running optimally. Empowerment undertaken by the government in the initial phase is quite a role in providing training and counseling. The next step of participatory society and government have collaborated in developing UMKM. While the government is still constrained emancipatory phase of the provision of facilities and infrastructure in the development of UMKM.*

Keywords: *MSME Empowerment Strategy, Economic Development*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi DinKop UMKM dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang fokus pada sektor usaha. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya pasar modern yang menyebar hingga ke pelosok sehingga secara tidak langsung mematikan pasar tradisional. Oleh karena itu berdampak pada UKM yang menghasilkan produk yang kualitasnya tidak dapat bersaing dengan produk pasar saat ini. Dalam hal ini mekanisme pasar menjadi salah satu indikator berkembangnya UKM. Selain itu, amanah DinKop UMKM harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menghasilkan produk-produk inovatif. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah memerlukan tiga tahap awal, yaitu tahap partisipasi dan tahap emansipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinkop UMKM dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah belum berjalan maksimal. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pada tahap awal sangat bermanfaat melalui pelatihan dan penyuluhan. Selain itu, pada fase partisipatif, masyarakat dan pemerintah berkolaborasi dalam pengembangan UKM. Pada saat yang sama, pemerintah masih terbatas dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengembangan UKM pada tahap berikutnya.

Kata kunci: Strategi Pemberdayaan UMKM , Pengembangan Ekonomi

PENDAHULUAN

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015 membawa peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia. Dengan berlakunya MEA pada akhir tahun 2015, negara-negara ASEAN akan mengalami pergerakan bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil

ke dan dari masing-masing negara. MEA merupakan peluang sekaligus beban yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM dalam negeri. Melalui MEA terjadi integrasi dalam bentuk “free trade area” atau kawasan perdagangan bebas, penghapusan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan modal yang bebas, yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masing-masing negara. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2012, jumlah UKM sebanyak 56,5 juta unit atau 99,9% dari seluruh unit usaha di Indonesia. Dari seluruh unit usaha UMKM, secara rinci mayoritas UMKM didominasi oleh usaha mikro sebanyak 55,8 juta unit atau 98,7%. Perusahaan kecil menyusul sebanyak 629.418 unit (1,11%) dan perusahaan menengah sebanyak 48.997 unit (0,99%). Artinya 99,9 persen unit UKM Indonesia harus siap menjadi yang terdepan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Namun kesiapan produk UMKM menjadi barang ekspor masih menjadi ancaman. Meski menyumbang 57,48% terhadap PDB, namun kinerja ekspor produk UMKM masih jauh di bawah kinerja ekspor perusahaan besar. Pangsa produk UMKM dalam ekspor hanya 14,06%. Inilah beban tugas yang harus dilaksanakan pemerintah.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Kediri yang bertugas membekali dan mempersiapkan Koperasi dan UKM Kota Kediri dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Untuk mencapai tujuan akhir yang optimal maka dirancang suatu strategi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kemudian dipadukan dengan beberapa program dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sesuai dengan nomor undang-undang pemerintahan daerah. . 32 Peran utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2004 adalah sebagai lembaga yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk penyediaan jasa-jasa tersebut. sebagai pembiayaan. dan penyelamatan bimbingan, bantuan dan pengelolaan. perjanjian pinjaman untuk koperasi dan UKM. Pengembangan pelatihan teknis bagi usaha mikro, kecil dan menengah, keterampilan vokasi, permodalan/investasi bagi koperasi, industri kecil, UKM, pengawasan dan pengendalian simpan pinjam bagi usaha mikro, UKM dan menengah. Memahami pentingnya peran koperasi dan UKM, selain komitmen yang kuat, diperlukan perencanaan yang matang agar potensi energi koperasi dan UKM dapat dikembangkan. Pemberdayaan koperasi UMKM bukanlah sebuah keterlibatan politik jangka pendek melainkan proses politik jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan rencana strategis jangka panjang yang berkelanjutan. Perkembangan koperasi UMKM yang bertahap tidak akan mengarah pada berkembangnya koperasi UMKM yang berdaya saing.

Keberadaan usaha kecil merupakan konsekuensi logis dari perubahan sosial, ekonomi dan politik dari sistem ekonomi pertanian ke non pertanian. Sesuai komitmen pemerintah, pengembangan

kawasan usaha kecil di pedesaan merupakan langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di pedesaan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penegasan Saleh (2006) bahwa mendorong berkembangnya lapangan kerja non-pertanian pedesaan di pedesaan adalah berkembangnya industrialisasi pedesaan yaitu berkembangnya usaha-usaha kecil. Agar UKM di Kota Kediri dapat bersaing dan beroperasi sebagai pengusaha atau wirausaha yang tangguh dan mandiri maka diperlukan modal yang kuat, sehingga Pemerintah Kota Kediri membuka akses pengembangan kekuatan modal sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri No. 19. 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ekuitas adalah sejumlah uang atau barang modal yang ditanamkan oleh pemodal untuk menumbuhkan dan memperkuat koperasi, mikro dan UKM guna meningkatkan usahanya. Program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus merupakan rangkaian kegiatan Pemerintah Kota Kediri untuk mempercepat pemulihan perekonomian pasca krisis dalam bentuk penyertaan modal. pemerintah Provinsi. Tujuan dari program ini adalah :

- a. Mengarahkan sumber permodalan kepada koperasi dan UMKM di kota Kediri
- b. Mewujudkan tumbuhnya dunia usaha koperasi dan pelaku UMKM sebagai peran serta langsung dalam proses pembangunan kota Kediri
- c. Dana bergulir bagi koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha
- d. Implementasi program penguatan permodalan koperasi dan usaha kecil menengah di kota Kediri yaitu : Sukses penyaluran. Penggunaan yang sukses, Keberhasilan pengembalian uang untuk dapat mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis keuangan yang produktif.

Namun dalam pelaksanaan program Pemerintah Kota Kediri tentunya terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut, faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya yang dialokasikan, pemasaran dan produksi. Namun faktor eksternal meliputi pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk dan perkembangan teknologi, serta status kelompok pesaing atau kelompok pendukung.

Sementara itu, selain mengetahui faktor-faktor tersebut, kemampuan pengusaha dalam menentukan strategi juga sangat mempengaruhi pemberdayaan UMKM yang ada di kota Kediri, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut terus menguat dan berkembang lebih jauh yaitu memanfaatkan peluang yang ada. dari semua manfaat lingkungan. kondisi dan peluang yang tersedia. Mengingat kenyataan ini, dipandang perlu untuk mengkaji strategi untuk meningkatkan dampak usaha mikro, kecil dan menengah. Rumusan masalah penelitian adalah strategi apa yang sebaiknya diterapkan dan tepat untuk mengatasi kendala pemberdayaan UKM di kota Kediri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

UKM merupakan kegiatan ekonomi yang mendominasi lebih dari 95 persen struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini mempunyai peranan strategis baik secara ekonomi maupun sosial. Fungsi ekonomi sektor ini meliputi penyediaan barang dan jasa kepada konsumen dengan daya beli rendah hingga menengah, lebih dari sepertiga pertumbuhan ekonomi negara, dan perolehan devisa. Secara sosial dan politik, tugas sektor ini juga sangat penting terutama dalam merekrut tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan (BPIK, 2004). Pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil merupakan kebutuhan pokok di Indonesia yang mengikuti sistem perekonomian yang unik yaitu perekonomian nasional.

- a. Di Indonesia, sulitnya mendefinisikan usaha kecil terlihat jelas pada beragamnya batasan usaha kecil, dimana setiap cabang mengembangkan batasan dan definisinya masing-masing. Batasan dan definisi pengelolaan dan pengembangan setiap program kerja sektoral ditetapkan. Tidak semua lembaga memiliki kesepakatan mengenai masalah ini, namun perbedaan pendapat tersebut terutama mengenai ambang batas untuk usaha kecil. Batasan-batasan ini mencerminkan preferensi dan Mengarahkan sumber permodalan kepada koperasi dan UMKM di kota Kediri
- b. Mewujudkan tumbuhnya dunia usaha koperasi dan pelaku UMKM sebagai peran serta langsung dalam proses pembangunan kota Kediri
- c. Dana bergulir bagi koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha
- d. Implementasi program penguatan permodalan koperasi dan usaha kecil menengah di kota Kediri yaitu : Sukses penyaluran. Penggunaan yang sukses, Keberhasilan pengembalian uang untuk dapat mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis keuangan yang produktif.

Namun dalam pelaksanaan program Pemerintah Kota Kediri tentunya terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut, faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya yang dialokasikan, pemasaran dan produksi. Namun faktor eksternal meliputi pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk dan perkembangan teknologi, serta status kelompok pesaing atau kelompok pendukung.

Sementara itu, selain mengetahui faktor-faktor tersebut, kemampuan pengusaha dalam menentukan strategi juga sangat mempengaruhi pemberdayaan UMKM yang ada di kota Kediri, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut terus menguat dan berkembang lebih jauh yaitu

memanfaatkan peluang yang ada. dari semua manfaat lingkungan. kondisi dan peluang yang tersedia. Mengingat kenyataan ini, dipandang perlu untuk mengkaji strategi untuk meningkatkan dampak usaha mikro, kecil dan menengah. Rumusan masalah penelitian adalah strategi apa yang sebaiknya diterapkan dan tepat untuk mengatasi kendala pemberdayaan UKM di kota Kediri.

TINJAUAN PUSTAKA

e. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang mendominasi lebih dari 95 persen struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini mempunyai peranan strategis baik secara ekonomi maupun sosial. Fungsi ekonomi sektor ini meliputi penyediaan barang dan jasa kepada konsumen dengan daya beli rendah hingga menengah, lebih dari sepertiga pertumbuhan ekonomi negara, dan perolehan devisa. Secara sosial dan politik, tugas sektor ini juga sangat penting terutama dalam merekrut tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan (BPIK, 2004). Pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil merupakan kebutuhan pokok di Indonesia yang mengikuti sistem perekonomian yang unik yaitu perekonomian nasional.

Di Indonesia, sulitnya mendefinisikan usaha kecil terlihat jelas pada beragamnya batasan usaha kecil, dimana setiap cabang mengembangkan batasan dan definisinya masing-masing. Batasan dan definisi pengelolaan dan pengembangan setiap program kerja sektoral ditetapkan. Tidak semua lembaga memiliki kesepakatan mengenai masalah ini, namun perbedaan pendapat tersebut terutama mengenai ambang batas untuk usaha kecil. Batasan-batasan ini mencerminkan preferensi perusahaan menciptakan kemampuan lingkungan baru. Selain itu juga dapat mengurangi risiko karena meramalkan masa depan. Kajian ini melibatkan beberapa unsur terkait mulai dari aparat pemerintah daerah, Petugas Pelayanan Koperasi UMKM Kota Kediri dan masyarakat. Asumsi yang dibangun dari setiap unsur bertujuan untuk membentuk gambaran yang nyata, faktual, utuh dan obyektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk memperoleh informasi dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Informasi tersebut merupakan informasi dasar sebagai informasi pendukung yang diperoleh dari Dinas Penyimpan Koperasi dan UMKM Kota Kediri serta Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Kota Kediri (DPPKA) terkait Pendapatan Awal Daerah yang berkaitan dengan Koperasi. dan program dampak UMKM. Data sekunder diperoleh dari pengusaha UMKM. Hasilnya akan digunakan untuk analisis dan penelitian mendalam yang berguna bagi pemerintah provinsi dan masyarakat untuk penelitian yang mendesak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian sekaligus diberikan diskusi yang komprehensif. Hasil dapat disajikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel dan lain-lain yang membuat pembaca mengerti dengan mudah. Pembahasan dapat dilakukan dalam beberapa sub-bab.

1. Startegi Pemerintah Kota Kediri dalam Pemberdayaan UMKM

Kehadiran usaha kecil di pedesaan dalam sistem ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik dari segi lingkungan internal maupun eksternal. Pengaruh lingkungan mempengaruhi kebijakan dan strategi yang diterapkan. Penerapan perubahan lingkungan internal mempengaruhi kekuatan dan kelemahan, dan perubahan lingkungan eksternal mempunyai dampak yang potensial dan mendasar terhadap terciptanya peluang dan ancaman pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan kondisi di atas, diharapkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah kota Kediri mampu mengantisipasi perubahan melalui pengambilan keputusan yang strategis. Ada beberapa alternatif strategi yang bisa diterapkan dalam suatu usaha, tentunya penerapan strategi yang tepat akan membawa kemajuan yang berarti bagi usaha itu. Strategi-strategi yang bisa diterapkan dalam suatu usaha antara lain :

2. Kebijakan dukungan pemerintahModal.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (MEME) di Kota Kediri tidak lepas dari dukungan perbankan dalam memberikan pinjaman kepada UKM. Pinjaman UKM tumbuh setiap tahun, dan biasanya pertumbuhannya lebih besar dari jumlah total pinjaman bank. Keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Kediri tidak lepas dari dukungan dan peran pemerintah Kota Kediri dalam menggalakkan penyaluran pinjaman kepada UKM. Berbagai program kredit/pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang dicanangkan pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor usaha tertentu seperti ketahanan pangan, peternakan, dan pertanian. Peran pemerintah dalam skema kredit UMKM ini adalah dengan mengalokasikan dana APBD untuk subsidi bunga pada skema kredit tersebut.

Sabirin (2001) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat kecil adalah tentang penyediaan sumber pembiayaan yang terjangkau bagi usaha. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan membutuhkan. Lembaga keuangan mikro ini ada karena memenuhi kebutuhan uang masyarakat miskin ketersediaan dana. Masyarakat miskin tidak terlayani dalam kegiatan perbankan atau lembaga keuangan formal, karena pemberdayaan UKM akan berhasil bila seluruh pemangku kepentingan bekerja sama secara adil sesuai peran masing-masing. Jika otoritas pengatur termasuk pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan dunia perbankan dapat bertindak sesuai peran dan tanggung jawabnya,

maka keberhasilan dan kesuksesan usaha kecil dan menengah akan cepat tercapai. Jadi, pada akhirnya, peningkatan penerimaan pajak untuk menarik wajib pajak baru dan nilai pajaknya akan terus meningkat.

Pemerintah Daerah Kota Kediri merupakan badan pengatur pada dasarnya mengumumkan program atau skema untuk memberdayakan UMKM. Optimalisasi program wisata harus terus dilanjutkan. Program tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Selain itu, permasalahan permodalan juga menjadi permasalahan klasik bagi UMKM, termasuk usaha kecil menengah di pusat kota Kediri. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri mengambil langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan modal bagi UKM. Program yang dikeluarkan pemerintah kota Kediri dalam bentuk kemitraan sesuai dengan peraturan daerah kota Kediri ibukota tahun 2007 Partisipasi melalui program pemberdayaan bagi koperasi, mikro, kecil dan koperasi perusahaan menengah.

Program untuk memperkuat struktur permodalan mencakup dukungan pinjaman dan hibah yang menguntungkan, dan pertemuan bisnis yang mendorong kemitraan dengan sektor swasta. Salah satu upaya yang mendukung akses UKM terhadap permodalan adalah dengan pemberian bantuan modal kerja. Program ini dikelola oleh satu SKPD, Dinas Koperasi dan UMKM serta DPPKAD (Dinas Pendapatan, Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset). Besaran anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bantuan keuangan diberikan melalui sistem pinjaman Dana Kontinjensi dengan bunga pinjaman sebesar 4% per tahun atau hanya 0,5% per bulan selama tiga tahun. Proses pengajuan dan verifikasi pinjaman ditangani oleh koperasi dan dinas UMKM, sedangkan pembayaran pinjaman dilakukan oleh DPPKAD. Bantuan pinjaman diberikan kepada UKM yang modalnya masih kecil dan mempunyai bunga serta membutuhkan pinjaman modal.

Selain bantuan dari pihak Pemerintah Daerah diharapkan Bank Indonesia bekerjasama untuk lebih berperan aktif melakukan pembinaan dan berbagai aktivitas untuk pemberdayaan UMKM dalam bentuk program Konsultan Keuangan Mitra Bank. Program ini dimaksudkan antara lain manajerial sebagai baik pendampingan di bidang keuangan, pemasaran, kapasitas pengelolaan serta administrasi UMKM. Hal senada juga dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah berupa program ekonomi kerakyatan pemda serta keunggulan komparatif daerah. Salah satu hal terpenting lagi adalah program sosialisasi berbagai program agar program pemberdayaan UMKM dapat dengan mudah diakses.

3. Perluasan Akses Informasi Jaringan Pemasaran bagi UMKM

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka

UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan misalnya :

- 1) Jenis barang atau produk apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen di daerah tertentu.
- 2) Bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut,
- 3) Berapa harga pasar yang berlaku
- 4) Selera konsumen pada pasar lokal regional, maupun internasional.

Dengan demikian, UMKM dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dalam menjalankan usahanya akan lebih inovatif.

Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses untuk pemasarannya. memperluas jaringan. Selain memiliki kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun diluar negeri. Selama ini promosi UMKM di Kota Kediri lebih banyak dilakukan melalui pameran-pameran bersama dalam waktu dan tempat yang terbatas, sehingga hubungan maupun transaksi dengan konsumen kurang bisa dijamin keberlangsungannya. Hal itu dapat disebabkan oleh jarak yang jauh atau kendala intensitas komunikasi yang kurang. Padahal faktor komunikasi dalam menjalankan bisnis adalah sangat penting, karena dengan komunikasi akan membuat ikatan emosional yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada, juga memungkinkan datangnya pelanggan baru.

4. Promosi Produk Unggulan

Mengatasi adanya keterbatasan pemasaran pelaku UMKM di Kota Kediri, serta persaingan yang tidak sehat dari para pelaku UMKM, peningkatan aksesibilitas pada pasar yang telah dilakukan pemerintah melalui pameran dan promosi produk produk unggulan daerah, temu bisnis, pembuatan leaflet dan pembinaan pengemasan. Upaya promosi dilakukan dengan mengikuti pameran didalam daerah, seperti pada saat hari Koperasi, Hari jadi Kota Kediri ataupun pameran di beberapa event Pemerintah Kota Kediri pada saat ada tamu dari luar daerah atau dari luar negeri. Promosi produk unggulan juga bisa dengan mengikuti pameran di luar daerah yang potensial pada moment-moment tertentu, seperti pada Event seperti pameran Dekranasda yang biasa dilaksanakan di Kota- kota besar setiap tahunnya, Event Jakarta Fashion Week, Gelar kerajinan nasional daerah dan produk industri kreatif nusantarayang dapat menjadi tolok ukur penting bagi kemajuan UMKM di Kota Kediri,

kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM karena ada ratusan stan yang diperuntukan pelaku UMKM tanpa dikenakan biaya apapun alias gratis guna mengenalkan produk-produk unggulannya untuk dipamerkan/dipasarkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan daerah, menjaring konsumen dan menggalang kontak dagang serta mengikuti perkembangan pasar. Pada kegiatan ini sasaran peserta yang diikuti dalam kegiatan ini lebih diperluas, tidak hanya yang sudah mengikuti kegiatan pameran secara aktif saja, tetapi juga kepada para pelaku UMKM yang belum berdaya dan belum mengikuti pameran lebih didorong dan dimotivasi untuk mengikutinya.

5. Strategi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Untuk . Menghadapi Pasar Bebas Asean

5.1. Penguatan lembaga pendamping melalui Peningkatan Capacity Building

Setyobudi (2017) menyebutkan bahwa Bank Indonesia lebih fokus pada penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Pelatihan- pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM, dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM.
- b. Pendirian pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM), sebagai pilot projet. P3UKM antara lain bertugas melakukan pelatihan akreditasi pendamping UKM
- c. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK terdiri dari Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan / lending model Usaha Kecil (SILMUK), Sistem Penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI) dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia.
- d. Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Kegiatan penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan arah kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pemberian bantuan teknis dan juga dalam rangka penyediaan informasi yang berguna dalam rangka pengembangan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UMKM serta untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan peran UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia melakukan kajian identifikasi peraturan pusat dan daerah dalam rangka pengembangan UMKM serta kajian dan implementasi pilot project klaster pengembangan UMKM.

Sesuai dengan pernyataan diatas untuk strategi penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan. Pemerintah Kota Kediri harus lebih intensif dalam Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. Untuk menciptakan wirausaha baru (pelaku UMKM), maupun pengembangan dan pemberdayaannya salah satunya lewat kegiatan pelatihan kewirausahaan. Di Kota Kediri sudah pernah melaksanakan kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM antara lain:

- a. Pelatihan membatik khas Kota Kediri, dengan mengirimkan 6 orang pelaku UMKM di Sentra Batik desa dermo dan di fasilitasi oleh Disperindag.
- b. Pelatihan menjahit dan border dengan mendatangkan narasumber dari SKPD terkait untuk memberi pelatihan usaha tentang menjahit dan bordir bagi pelaku UMKM sebanyak 25 orang di tiap Kecamatan.
- c. Pelatihan ternak ikan Lele dengan mendatangkan narasumber Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur bagi pelaku usaha ternak ikan lele. Diharapkan tiap Pelatihan dilakukan secara berkala, karena pelatihan-pelatihan dan seminar bisa menambah ilmu dan ketrampilan bagi pelaku UMKM di Kota Kediri.

5.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia pada UMKM melalui IT (Information Technology)

Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan , menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Melalui pemanfaatan teknologi ini, perusahaan mikro, kecil, maupun menengah dapat memasuki pasar global. Perusahaan yang awalnya kecil seperti toko buku Amazon, portal Yahoo, dan perusahaan lelang Ebay, ketinganya saat ini menjadi perusahaan raksasa hanya dalam waktu singkat karena memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan usahanya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat , serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas.

Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang menembus ekspor terbuka luas. Biaya transaksi (Transaction Cost), merupakan biaya-biaya yang timbul dari proseskegiatan bisnis. Biaya ini mencakup biaya komunikasi (baik di dalam organisasi dandengan organisasi lain), pembelian asuransi, memperoleh informasi tentang produk danlayanan, sesuai dengan kontrak dan banyak lagi. Biaya dari semua ini berpotensi dapatdikurangi dengan sistem TI yang lebih baik. Hal ini terutama berlaku dengan jaringan,yang dapat mengurangi biaya komunikasi antara bagian geografis terpisah dari organisasi, pemasok dan

pelanggan. Hal positif yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan jaringan internet dalam mengembangkan usaha adalah :

- (1) dapat mempertinggi promosi produk dan layanan melalui kontak langsung, kaya informasi, dan interaktif dengan pelanggan,
- (2) menciptakan satu saluran distribusi bagi produk yang ada,
- (3) biaya pengiriman informasi ke pelanggan lebih hemat jika dibandingkan dengan paket atau jasa pos,
- (4) waktu yang dibutuhkan untuk menerima atau mengirim informasi sangat singkat, hanya dalam hitungan menit atau bahkan detik.

Oleh karena itu, agar UMKM di Kota Kediri dengan segala keterbatasannya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu dukungan berupa pelatihan dan penyediaan fasilitas. Tentu saja tanggungjawab terbesar untuk memberi pelatihan dan penyediaan fasilitas ini ada di tangan Pemerintah Daerah, disamping pihak-pihak lain yang punya komitmen, khususnya kalangan perguruan tinggi. Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT ini perlu dibangun di setiap kota atau jika mungkin di setiap kecamatan. Fasilitas tersebut berupa ruangan khusus dilengkapi dengan seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet, serta dilengkapi website UMKM masing-masing daerah, di bawah pengelolaan dan pembiayaan pemerintah daerah.

Mengapa perlu dibuat Pusat Pengembangan UMKM Berbasis IT di tingkat kota atau kecamatan? Hal ini didasari pada kenyataan bahwa sebagian besar. UMKM berlokasi di desa-desa dan kota-kota kecamatan, serta belum mampu untuk memiliki jaringan internet sendiri, apalagi memiliki websitenya. Padahal untuk pengembangan usaha dengan akses pasar global harus memanfaatkan media virtual. Pusat Pengembangan UMKM Berbasis IT ini akan memudahkan UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan waktu dan biaya yang efisien. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat UMKM dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya akan meningkat, dan secara bersinergi akan berdampak positif terhadap keberhasilan pembangunan nasional.

Pada dasarnya produk UKM Indonesia banyak memiliki kualitas sama dengan produk luar negeri, atau bahkan lebih baik lagi. Namun produk luar tersebut seringkali unggul dalam teknologi, baik dalam teknologi produksi, pengemasan maupun pemasarannya. Guna memenangkan persaingan, UMKM juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Pada dasarnya dengan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi meskipun ada sedikit perbedaan cost dengan sistem tradisional, UMKM dapat menikmati fasilitas dari IT yang akan memberikan return yang sepadan. Dengan IT UMKM akan lebih siap untuk

bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan produk-produk luar negeri. Kita dapat bersaing dari segi kualitas, pengemasan, dan kecepatan operasi perusahaan serta yang lebih penting lagi adalah dalam pemasaran produk UMKM.

6. Membangun Daya Saing

Disamping menghadapi era globalisasi, tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah Kota Kediri adalah demokratisasi dan desentralisasi atau otonomisasi. Demokratisasi dicirikan oleh kebebasan berfikir, berkata, dan bertindak. Demikian juga dalam era otonomisasi dimana peran pemerintah pusat tidak seperti pada era sebelumnya yang sentralistik. Masing-masing daerah bebas mengembangkan kreasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Oleh karenanya beberapa hal yang menjadi poin penting guna mampu membangun daya saing daerah, yaitu (1) harus selalu kreatif, inovatif, dan mampu memahami perubahan yang terjadi; (2) mampu menggali dan mengembangkan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan yang komparatif menjadi keunggulan kompetitif, (3) adanya komitmen bersama untuk mengembangkan pengrajin baru yang memiliki semangat dan jiwa kewirausahaan yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, hipotesis dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari beberapa pendekatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam strategi pemberdayaan UMKM menggunakan pendekatan yang terakhir. Peran Pemerintah dalam hal ini sebagaimana pendapat Cornelis dan Miar (2005:84), adalah untuk memfasilitasi dan memberdayakan para pelaku UMKM yang belum berdaya menuju ke tingkat lebih berdaya, dan yang sudah berdaya dikembangkan kearah yang lebih maju serta diharapkan mampu mengangkat para pengusaha yang belum berdaya tersebut dan tentunya harus ada peran aktif serta partisipasi masyarakat didalamnya serta dapat memberikan hasil yang lebih baik.
2. Strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, tanpa agunan. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.
3. Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah

dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Aplikasi teknologi informasi pada usaha mikro, kecil dan menengah akan mempermudah UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien. Pembentukan Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT dianggap mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi informasi saat ini.

- Menumbuhkan kepedulian yang tinggi terhadap organisasi secara keseluruhan, tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya secara baik, tetapi lebih dari itu perlu memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek keberhasilan organisasi.
- Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih maksimal
- Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan kegiatan berorganisasi.
- Mengikuti dan mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah–langkah ke depan.
- Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama–sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L, 2007, Petani Desa dan Kemiskinan. BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pengembangan Industri Kecil, 2004, Program Lima Tahun Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada PELITA VI.
- Bank Indonesia. 2011. Five Finger Philosophy:Upaya Memberdayakan UMKM, (online), (http://www.bi.go.id/web/id/UM_KMBI/Koordinasi/Filosofi+Lima+Jari/ ,diakses 3 oktober 2011).
- Certo, Samuel & Peter, Paul, 2000, Strategi Managemen. Mc Graw Hill, New York.
- Diskop Jatim. 2010. Sinkronisasi Pembangunan KUMKM. (online), (http://lensa.diskopjatim.go.id/liputan_khusus/23-liputan-khusus/175-sinkronisaspembangunan_kumkm.html, diakses 10 oktober 2011).
- Drucker, Peter F, 2002, Managing for the Future. Truman Talley Books, New York.
- Ermawati, E, 2004, Subkontrak dan Implikasinya Terhadap Pekerja Perempuan. Akatiga, Bandung.
- Fred, David, 2005, Concept of Strategi Management. Macmilan Publishing Co, New York.

- Galeri UKM. 2011. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Online),
([http://galeriukm.web.id/news/kriteria usaha-mikro-kecil-dan-menengah umkm](http://galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm), diakses 1
oktober 2011). Harsono, 2010, Manajemen Pabrik. Balai Aksara, Jakarta.
- Hidayat, Hamid, 2011, Masalah Struktur Agraria dan Kedudukan Sosial Ekonomi Masyarakat di
Desa Pujon. Thesis IPB, Bogor.
- Kotler, P, 2010, Manajemen Pemasaran Analisa, Perencanaan dan Pengendalian. Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, M, 2007, Ekonomi Pembangunan. AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kusnadi, M, 2011, Penggunaan Sumber Daya dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Lembaga
Pelayanan di Pedesaan DAS Kunto. Thesis IPB, Bogor.
- Sabirin, S. 2001. Pemanfaatan Kredit Mikro untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat di
dalam Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Lustrum IX Universitas Andalas, Padang, 13
September 2001.
- Setyobudi, Andang. 2007. Peran serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM), Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5,
nomor 2, Agustus 2007. Jakarta: Bank Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga
Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.